

1. Open yang dikawatirkan... 2. Setiap orang yang tidak mau... 3. Open adalah... 4. Open adalah...

INTERAKTIF... 1. Open yang dikawatirkan... 2. Setiap orang yang tidak mau... 3. Open adalah... 4. Open adalah...

Efek Domino Pajak Karbon

Belum usai dampak pandemi yang menghantam pelaku usaha, kini dibayang-bayang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pemunculan adalah, penerapan pajak karbon.

akan biaya produksinya untuk menutupi tingginya biaya operasional. Namun sebaiknya pemerintah hati-hati dalam menetapkan kebijakan ini mengingat dampaknya yang berganda. Bukan hanya dari sisi penarikan di industri tetapi juga permintaan di masyarakat. Inflasi sudah dipastikan terjadi. Jika terjadi inflasi, tentu akan ada kenaikan konsumsi barang. Ujung-ujungnya memengaruhi daya beli lalu ekonomi akan anjak kembali. Apalagi situasi saat ini perekonomian belum pulih 100 persen.

Namun dampaknya tentu besar. Semua 'Dembang' Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang di nilai tak ramah lingkungan, akan dikenai pajak. Tentu pihak yang menanganinya listrik tak mau menanggung beban sendiri, jika dikenai pajak, tentu akan berdampak ke konsumen akhir. Jika listrik mahal, tentu semua sektor akan kesus-

beranda Aldi Amin Davi

IKN Baru

Sepertinya sudah hampir pasti Indonesia akan punya ibukota negara (IKN) baru. Hal ini mendapat dukungan DPR-RI seperti terus bergal maju dengan rencana untuk merelokasi ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

Pemerintah juga menyiapkan hitungan-hitungan yang menunjukkan bahwa relokasi ibukota harus dicermati dalam pelaksanaan pembangunan IKN baru. Sebagian area yang data yang beredar, seandainya pembangunan negara dalam pembangunan IKN hanya sebesar 19,8 persen atau Rp 99,4 triliun dan keseluruhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Terkan pembangunan IKN baru, sejumlah kalangan menyampaikan kritiknya. Kritik datang dari berbagai kalangan, seperti juga dukungan IKN baru datang dari banyak kalangan. Tentu saja para pengkritik secara jelas menyampaikan rencana pembangunan IKN baru tidak layak dilakukan saat ini karena hanya akan menambah beban negara. Menurut mereka pandemi Covid-19 membuat perekonomian sangat tertekan dan juga utang pemerintah meningkat tajam. Ini termasuk dalam defisit anggaran yang meledak hingga 6 persen di tahun lalu. Mereka menilai penyelesaian secara tuntas pandemi Covid-19 adalah sesuatu yang harus diprioritaskan dan keselamatan warga, konstitusional. Sedangkan pemerintahan IKN bukan merupakan tugas dan kewajiban konstitusional.

Negara tetangga seperti Malaysia, memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, 2003, dan Myanmar merubah ibukotanya ke Naypyidaw di 2006. Adapun Presiden Jokowi akan membagi 'kue ekonomi' ke kawasan di luar Jawa dan bagian yang agak ke Timur Indonesia. Seseorang yang tidak bayangkan 5 tahun yang lalu. Cankit membuka beberapa peluang perangsang pejabat terkait, bahwa relokasi ibukota harus direalisasikan 17 Agustus 2024. Sudah akan dilaksanakan di Istana Negara dan Gedung parlemen yang ada di IKN baru. Bahkan saat ini, berbagai lembaga tinggi negara dan kementerian sudah akan ikut pindah ke IKN baru sebagai wakil Presiden dan Wakil Presiden.

Korelasi Pengangguran dan Kemiskinan



SUNTONO, Kepala BPS

DISKURSI keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran kerap kali mengemuka di ruang publik. Bahkan tidak jarang ada analisis mengaitkan satu indikator dengan indikator lainnya.

menjuki pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengacu keterbandingan dengan statistik negara lain. Konsep kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Konsep tersebut mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesehatan dan gizi yang layak.

Sebelum masuk terlalu dalam, saya mengacu kembali ke kota A. Di kota A, informasi tentang kemiskinan dalam dua tahun terakhir sebagai berikut, pada tahun 2020 sebesar 4,54 persen, sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen. Ada dua kondisi data yang kalau kita sandingkan nampaknya kurang sejalan.

Agar hasil analisis memberikan kesimpulan yang tepat, maka pemahaman baik tentang hal ikhwal dari indikator menjadi keharusan. Sebab, apapun alat analisis digunakan, masalah pemahaman melatarbelakangi sebuah indikator belum cukup baik, sangat mungkin simpulan dinarasikan kurang bermakna.

Logika berkata kalau kemiskinan yang rendah mestinya pengangguran juga rendah pun sebaliknya. Sedangkan kasus kota A nampaknya agak berbeda, penganggurannya relatif tinggi tetapi kemiskinannya relatif rendah. Kenapa bisa begitu? Di sini lah kehati-hatian sangat diperlukan. Perlu kita, data pengangguran dan kemiskinan umumnya berkebalikan.

Sebelum masuk terlalu dalam, saya mengacu kembali ke kota A. Di kota A, informasi tentang kemiskinan dalam dua tahun terakhir sebagai berikut, pada tahun 2020 sebesar 4,54 persen, sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen. Ada dua kondisi data yang kalau kita sandingkan nampaknya kurang sejalan.

Konsep Ketrakerjaan

Dalam pengembangan indikator statistik ketrakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada Jobber Force Framework dengan batas bawah umur yang digunakan (Economically Active Population) adalah 15 tahun. Walaupun dalam pendataan statistik negara lain.

Beberapa Penganggur Itu Miskin

Mungkin sebagian dari kita mengaitkan ya. Mungkin juga sebagian mengaitkan tidak, wab, argumentasi diadkan dasar tidak cukup kuat. Sebagai ilustrasi, ada sebuah ibu kota sebut saja nama 'A'. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota A sebesar 15,92 persen. Mengalami penurunan pada tahun 2021 TPT-nya sebesar 13,18 persen. Dari perkembangan data dua tahun terakhir mengindikasikan ada progres membaik. Memahami fenomena pengangguran di perkotaan harus lebih hati-hati sebab akan mererumuskan kita pada simpulan kurang tepat.

MENDATAR

- 4. boneka tiruan
5. pengemudi pesawat
9. keluang
10. bangsa ibran
11. sebuah negeri di Asia
12. pujan kepada Allah
13. bermukim
14. penutup muka
15. kertas tebal berbentuk persegi
16. perhiasan
17. orang intelek
24. orang yang mahir
25. ruang tempat bekerja
26. tidak tertambat
33. mahaguru
35. rime, tentang sifat
36. pangkal peresahan batn
38. kumpulan huruf
39. ahli dalam agama islam
40. kelapa yang dikeringkan

MEURUM

- 1. kumpulan
2. pandangan teoretis
3. cara teratur mengerjakan sesuatu
5. ruang atau rongga
7. makanan menjadi satu
8. tumbuhan pasasit tropis
16. tidak bertanggung
17. sangat rendah

TEKA-TEKI SILANG

Grid crossword puzzle with clues in Indonesian. Clues include: 18. gerakan badan yang berirama, 19. proses tuas-memutar, 20. polis rabasia, 21. memanjakan puji pujan, 22. pergimencari penghidupan, 23. alat pendeteksi, 29. bergerak maju, 30. binatang bertanduk, 31. orang yang memancarkan berta, 32. kerucian yang bertangga kuda, 33. keinginan kuat bertemu, 34. kerucian berjenjang, 35. kerucian berjenjang.

FAJAR logo and contact information. Includes address: Jl. Pemuda No. 100, Surabaya, and phone numbers: 031-82250000, 031-82250001, 031-82250002, 031-82250003, 031-82250004, 031-82250005, 031-82250006, 031-82250007, 031-82250008, 031-82250009, 031-82250010, 031-82250011, 031-82250012, 031-82250013, 031-82250014, 031-82250015, 031-82250016, 031-82250017, 031-82250018, 031-82250019, 031-82250020, 031-82250021, 031-82250022, 031-82250023, 031-82250024, 031-82250025, 031-82250026, 031-82250027, 031-82250028, 031-82250029, 031-82250030, 031-82250031, 031-82250032, 031-82250033, 031-82250034, 031-82250035, 031-82250036, 031-82250037, 031-82250038, 031-82250039, 031-82250040, 031-82250041, 031-82250042, 031-82250043, 031-82250044, 031-82250045, 031-82250046, 031-82250047, 031-82250048, 031-82250049, 031-82250050, 031-82250051, 031-82250052, 031-82250053, 031-82250054, 031-82250055, 031-82250056, 031-82250057, 031-82250058, 031-82250059, 031-82250060, 031-82250061, 031-82250062, 031-82250063, 031-82250064, 031-82250065, 031-82250066, 031-82250067, 031-82250068, 031-82250069, 031-82250070, 031-82250071, 031-82250072, 031-82250073, 031-82250074, 031-82250075, 031-82250076, 031-82250077, 031-82250078, 031-82250079, 031-82250080, 031-82250081, 031-82250082, 031-82250083, 031-82250084, 031-82250085, 031-82250086, 031-82250087, 031-82250088, 031-82250089, 031-82250090, 031-82250091, 031-82250092, 031-82250093, 031-82250094, 031-82250095, 031-82250096, 031-82250097, 031-82250098, 031-82250099, 031-82250100.



BERANDA
Aidir Amin Daud

IKN Baru

Seperitnya sudah hampir pasti Indonesia akan punya Ibukota Negara (bukota) baru. Pemerintah dengan dukungan DPR-RI sepertinya terus bergerak maju dengan rencana untuk merelokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

Kalangan pemerintah optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN segera akan diselesaikan di DPR-RI. Dalam RUU yang diberikan ke DPR RI September lalu, Indonesia berencana untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke area seluas 56.180 hektar (ha) di daerah Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

RUU itu juga mengatur terkait dengan wewenang Presiden RI, dengan persetujuan DPR, untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan kepala pemerintahan daerah IKN baru, yang dinamakan Kepala Otorita IKN. Sehingga sementara tak ada mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk IKN baru.

Terkait pembangunan IKN baru, sejumlah kalangan menyampaikan kritiknya. Kritik datang dari berbagai kalangan, seperti juga dukungan IKN baru datang dari banyak kalangan.

Tentu saja para pengkritik secara jelas menyampaikan rencana pembangunan IKN baru tidak layak dilakukan saat ini karena hanya akan menambah beban negara.

Menurut mereka pandemi Covid-19 membuat perekonomian sangat tertekan dan juga utang pemerintah meningkat tajam.

Ini tercermin dari defisit anggaran yang melebar hingga 6 persen di tahun lalu. Mereka menilai penyelesaian secara tuntas pandemi Covid-19 adalah sesuatu yang berbasis kepentingan dan keselamatan warga, konstitusional. Sedangkan pemindahan IKN bukan merupakan tugas dan kewajiban konstitusional.

Di tengah kritik itu — pemerintah memberikan argumentasi yang pada dasarnya ingin menegaskan bahwa IKN baru adalah sebuah sejarah dan legacy yang akan ditinggalkan oleh Kepemimpinan Jokowi bagi Indonesia.

Pemerintah juga menyampaikan hitungan-hitungan yang menegaskan bahwa tak ada yang terlalu harus dicemaskan dalam pelaksanaan pembangunan IKN baru. Sebagaimana yang data yang beredar, sesungguhnya porsi anggaran negara dalam pembangunan IKN hanya sebesar 19,18 persen atau Rp 89,4 triliun dari keseluruhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Sisa pembiayaan akan dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP) dan swasta Rp 253,4 triliun atau 54,38 persen, serta BUMN-BUMD sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,44 persen

Apapun pro-kontra yang beredar, pembangunan IKN baru memang salah satu 'lompatan' yang dilakukan Presiden Jokowi.

Indonesia sebenarnya sudah berkontemplasi terkait dengan rencana ini selama berdekade-dekade. Indonesia akan menjadi negaraketiga di Asia Tenggara yang merelokasi ibu kota negaranya.

Negara tetangga seperti Malaysia, memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya di 2003, dan Myanmar merubah ibu kotanya ke Naypyidaw di 2006.

Apapun Presiden Jokowi akan membagi 'kue ekonomi' ke kawasan di luar Jawa dan bagian yang agak ke Timur Indonesia. Sesuatu yang tidak kita bayangkan 5 tahunan yang lalu.

Dan kita membaca beberapa kali penegasan pejabat terkait, bahwa rangkaian hari perayaan Kemerdekaan 17 Agustus 2024 — sudah akan dilaksanakan di Istana Negara dan Gedung parlemen yang ada di IKN baru.

Bahkan saat itu, berbagai lembaga tinggi negara dan kementerian sudah akan ikut pindah ke IKN baru — sebagaimana Presiden dan Wakil Presiden.

Maka hari-hari ini, kita harus melihat pembangunan IKN baru adalah sesuatu yang positif bagi Indonesia, bagi kawasan timur Indonesia dan mungkin bagi propinsi yang berada di sekitarnya. Termasuk Sulawesi Selatan. ****